

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara tanpa harus melihat status strata sosial, kaya maupun miskin. Seperti halnya pendidikan di Kota Surabaya yang mewajibkan warganya minimal berpendidikan wajib belajar 12 tahun. Dengan berpendidikan tinggi maka dapat meningkatkan daya saing Kota Surabaya dengan daerah lain. Akan tetapi tidak semua masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan pendidikan wajib belajar 12 tahun hingga tuntas dikarenakan oleh tidak adanya biaya dan juga kemiskinan yang melanda sebagian warga Kota Surabaya. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan walikota yang mengatur tentang pendidikan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi dan dampak yang terjadi saat peraturan walikota ini dilaksanakan di Kota Surabaya khususnya pada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah atau masyarakat miskin di Kelurahan Wonokusumo. Dan juga mengingat bahwa kebijakan walikota ini merupakan peraturan yang sangat spesifik dan jelas. Diharapkan dengan adanya peraturan walikota tersebut dapat memfasilitasi anak – anak yang berasal dari keluarga miskin atau masyarakat miskin

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Dengan penentuan informan inti menggunakan metode purposive sampling dan yang kemudian mengkombinasikannya antara teknik purposive sampling dan teknik snowball. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak tersebut meliputi pemerataan dan perluasan pendidikan, memberikan pendidikan minimal supaya dapat mengembangkan potensi diri dan dapat hidup mandiri dan yang terakhir adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan 3 dampak tersebut sangat terlihat dapat membantu anak – anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun untuk meraih cita – citanya demi memperbaiki kondisi keluarganya kearah yang lebih baik.

Kata Kunci: evaluasi, dampak, pendidikan, wajib belajar 12 tahun, keluarga miskin

Abstract

Education is an obligation that must be implemented by every citizen of a country without having to look at the status of social strata, rich or poor so the government as the implementers of education in a region should be able to provide best execution for all citizen. So that the resident of an area or community can feel as much education as high it ill feel a charge toward as better.. for example. A child who came from poor families complete the 12 years of compulsory education or graduated from high school or vocation school. With highly educated then it can improve enhance mutual city of Surabaya with other region. But not all communities can feel the city of Surabaya the before , the government is sued a regulation governing mayor on education.

The study aims to describe how evaluation and impact that occur at the time the regulations with have been legalized mayor is carried on in the poor in villages wonokusumo. And also considering that the mayor is regulatory policy is very specific rules and clear. Expected by the mayor of the regulation can facilities children who came from poor families or poor society.

The research using qualitative methods. The determination of the core informans using purposive sampling method ang then combine the technique of purposive sampling and snowball technique. The next data collection is done by direct observation, interview and documentation.

The result of this study indicate that regulations are created and validated mayor is a form of government intervention against its citizen in terms of reaching the best education. And other result is to know what the impact include equality and the expansion of education. Provide minimal education in order ti develop theie potensial and the last to continue to persue higher degrees. With 3 very visible impact of these can help children of compulsory school age to 12 years to achieve his goals to improve the condition of his family towards a better.

Keywords : Evaluation, impact, education, compulsory 12 years, poor families